

KEK

Vol 13 No 2
tahun 2009

KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN

- **Pengaruh Variabel Ekonomi Makro Terhadap Return Saham Properti Pada Bursa Efek Indonesia**
- **Analisis Implementasi Check and Balance System Dalam Pengelolaan Keuangan Negara**
- **Analisis Investasi China ke Indonesia Sebelum dan Sesudah ACFTA**
- **Analysis of The Possibility of Price Level Targeting in Indonesia to Achieve Price Stability : An Alternative to Inflation Targeting**
- **Analisis Efektivitas Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Departemen Pendidikan Nasional**

ISSN 1410-3249



Pusat Kebijakan Ekonomi Makro
Badan Kebijakan Fiskal
Departemen Keuangan
Republik Indonesia

KAJIAN EKONOMI KEUANGAN

- Pengaruh Variabel Ekonomi Makro Terhadap *Return* Saham Properti Pada Bursa Efek Indonesia

- Analisis Implementasi *Check and Balance System* dalam Pengelolaan Keuangan Negara

- Analisis Investasi China ke Indonesia Sebelum dan Sesudah ACFTA

- *Analysis of The Possibility of Price Level Targeting in Indonesia to Achieve Price Stability: An Alternative to Inflation Targeting*

- Analisis Efektifitas Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada Departemen Pendidikan Nasional

J. Keu & Mon	Vol. 13	No.2	Jakarta 2009	ISSN 1410-3249
--------------	---------	------	--------------	----------------

KATA SAMBUTAN

Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Kajian Ekonomi dan Keuangan volume ini dapat hadir untuk pembaca sekalian. Edisi ini menyajikan berbagai topik yang beragam dan menarik dalam konteks perkembangan ekonomi dan keuangan. Kami juga melakukan beberapa perubahan pada penerbitan kali ini; perubahan dimaksudkan untuk memperbaiki penambilan jurnal; diantaranya kami lakukan perubahan terhadap ukuran jurnal, *setting* tulisan, dan *column* tulisan.

Kajian pada volume kali ini diisi oleh berbagai topik tulisan yaitu **Pengaruh Variabel Ekonomi Makro Terhadap *Return Saham Properti* Pada Bursa Efek Indonesia; Analisis Implementasi *Check and Balance System* dalam Pengelolaan Keuangan Negara; Analisis Investasi China ke Indonesia Sebelum dan Sesudah ACFTA; *Analysis of The Possibility of Price Level Targeting in Indonesia to Achieve Price Stability: An Alternative to Inflation Targeting*; dan Analisis Efektivitas Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada Departemen Pendidikan Nasional.**

Adapun para penulis yang berkontribusi yaitu R. Nurhidayat; Moh Firdaus Rumbia dan Deny Junanto; Ragimun; Telisa Aulia Falianty dan Eka Budiyantri; serta Abdul Aziz.

Demikianlah kata pengantar ini yang dapat disampaikan oleh Dewan Redaksi. Ibarat peribahasa tiada gading yang tak retak, maka kami menyadari tulisan ini tentunya masih terdapat kekurangan yang tidak kami sengaja. Oleh karena itu, kami mengharapkan masukan dari para pembaca guna perbaikan di masa yang akan datang. Selanjutnya, kami berharap Jurnal ini dapat memberikan manfaat kepada para pembaca. Selamat membaca!

Jakarta, 2009
Dewan Redaksi

DAFTAR ISI

Cover	
Dewan Redaksi	ii
Kata Sambutan	iii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vi
Daftar Gambar	vii
Kumpulan Abstraksi	ix
Pengaruh Variabel Ekonomi Makro Terhadap <i>Return Saham Properti</i> Pada Bursa Efek Indonesia	
Oleh: R. Nurhidayat.....	1
Analisis Implementasi <i>Check and Balance System</i> dalam Pengelolaan Keuangan Negara	
Oleh: Moh Firdaus Rumbia dan Deny Junanto.....	15
Analisis Investasi China ke Indonesia Sebelum dan Sesudah ACFTA	
Oleh: Ragimun.....	27
<i>Analysis of The Possibility of Price Level Targeting in Indonesia to Achieve Price Stability: An Alternative to Inflation Targeting</i>	
Oleh: Telisa Aulia Falianty and Eka Budiyanti.....	49
Analisis Efektivitas Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada Departemen Pendidikan Nasional	
Oleh: Abdul Aziz.....	85

DAFTAR TABEL

Pengaruh Variabel Ekonomi Makro Terhadap *Return* Saham Properti Pada Bursa Efek Indonesia

Tabel 1	Hasil Uji ADF	9
Tabel 2	Korelasi Antar Variabel Ekonomi Makro.....	10

Analisis Implementasi *Check and Balance System* dalam Pengelolaan Keuangan Negara

Tabel 1	Institusi-Institusi yang Terlibat dalam Pengelolaan Keuangan Negara	21
Tabel 2	Implementasi <i>Check and Balance</i> di Australia, Filipina, dan Indonesia	22

Analisis Investasi China ke Indonesia Sebelum dan Sesudah ACFTA

Tabel 1	Perkembangan Kebijakan Perdagangan Indonesia	31
Tabel 2	Perkembangan Realisasi Investasi China ke Indonesia 2001-2007.....	35
Tabel 3	Perbandingan perdagangan Indonesia-Cina terhadap Indonesia-Total Negara (Persen).....	38
Tabel 4	Rata-rata Perdagangan Indonesia Sebelum dan Era ACFTA (US\$)	38
Tabel 5	Perkembangan Realisasi Investasi (proyek) China dan Total Dunia....	39

Analysis of The Possibility of Price Level Targetting in Indonesia to Achieve Price Stability: An Alternative to Inflation Targetting

Table 1	Unit Root Test of Variables	69
---------	-----------------------------------	----

Analisis Efektivitas Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada Departemen Pendidikan Nasional

Tabel 1	Alokasi Pagu Anggaran BOS Tahun Anggaran 2005-2008.....	86
Tabel 2	Memilih Indikator Kinerja <i>Outcome</i> BOS	96
Tabel 3	<i>Paired Sample</i> APK SD.....	98
Tabel 4	<i>Paired Sample</i> APK SMP	99
Tabel 5	<i>Paired Sample</i> APM SD.....	100
Tabel 6	<i>Paired Sample</i> APK SMP	100
Tabel 7	<i>Paired Sample</i> Daftar SD	101
Tabel 8	<i>Paired Sample</i> Daftar SMP	101
Tabel 9	<i>Paired Sample</i> Putus SD.....	102
Tabel 10	<i>Paired Sample</i> Putus SMP	102
Tabel 11	<i>Paired Sample</i> Lulus SD	103
Tabel 12	<i>Paired Sample</i> Lulus SMP.....	103
Tabel 13	<i>Paired Sample</i> Lanjut SD	104
Tabel 14	<i>Paired Sample</i> Lulus SMP.....	104

DAFTAR GAMBAR

Analisis Investasi China ke Indonesia Sebelum dan Sesudah ACFTA

Gambar 1	Teori Diamond	31
Gambar 2	Total Perdagangan Indonesia – China dan Indonesia – Dunia	35
Gambar 3	Ekspor Migas dan Nonmigas ke China (Juta US\$).....	37
Gambar 4	Rata-rata Perdagangan Indonesia Sebelum dan Era ACFTA (US\$)..	38
Gambar 5	Perkembangan Realisasi Investasi (proyek) China dan Total Dunia..	39

Analysis of The Possibility of Price Level Targetting in Indonesia to Achieve Price Stability: An Alternative to Inflation Targetting

Figure 1	Summary of Research Methodology.....	64
Figure 2	Stationary of Inflation Data	69
Figure 3	Non-Stationary of CPI	69

Analisis Efektivitas Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada Departemen Pendidikan Nasional

Gambar 1	Alokasi Bantuan Operasional Sekolah, Bansos Depdiknas dan Depag, Fungsi Pendidikan.....	95
----------	---	----

MAJALAH KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN

ISSN 1410-3249

Volume 13 Nomor 2 Tahun 2009

Keywords used are free terms. Abstracts can be reproduced without permission or charge.

ABSTRAKSI

R. Nurhidayat, et. al. (Departemen Keuangan)

Pengaruh Variabel Ekonomi Makro Terhadap *Return Saham Properti* Pada Bursa Efek Indonesia

Kajian Ekonomi dan Keuangan Volume 13 Nomor 2 Tahun 2009, halaman 1-14

Abstract

The purpose of this paper is to provide an analysis of the long-run equilibrium relationships between the four macroeconomic variables and property stock index return of Jakarta Stock Exchange. In addition, a dummy variable is included to capture the impact of crisis. The macroeconomic variables analyzed are interest rate, inflation rate, exchange rate, and market return of Jakarta Stock Exchange using monthly observations from January 2003 through December 2008. Ordinary least square is used to test these relationships. Signal approach is also employed to identify crisis happened during last five years in Indonesia. Econometric result finds long-run equilibrium and significant relationship between Property stock index return and the macroeconomic variables. Finally, there are two crisis periods during last five years in Indonesia. The crises have negative effect on the stock return.

Keywords: Macroeconomic variables, Property, long-run equilibrium, crisis.

Rumbia, Moh Firdaus dan Junanto, Deny, et. al. (Departemen Keuangan, Lembaga Administrasi Negara)

Analisis Implementasi *Check and Balance System* dalam Pengelolaan Keuangan Negara

Kajian Ekonomi dan Keuangan Volume 13 Nomor 2 Tahun 2009, halaman 15-26

Abstract

Check and balance system is exceptionally relevant in public finance management. It can assure that every institutions—legislative, executive, and auditive—whose involve in public finance management perform appropriately based on its role and function. This paper analyzes and compares the implementation of check and balances system in public finance management in Australia, Philippines and including Indonesia. The findings are employed to develop the system in Indonesia. Once it has been

MAJALAH KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN**ISSN 1410-3249****Volume 13 Nomor 2 Tahun 2009*****Keywords used are free terms. Abstracts can be reproduced without permission or charge.*****ABSTRAKSI**

implemented, none of the institutions will abuse their power. Consequently the public budget will be more accountable and transparent for the benefit of the people.

Keyword: Check and Balance System, Public Finance Management

Ragimun, et. al. (Departemen Keuangan)**Analisis Investasi China ke Indonesia Sebelum dan Sesudah ACFTA****Kajian Ekonomi dan Keuangan Volume 13 Nomor 2 Tahun 2009, halaman 27-48*****Abstract***

Economic growth of China's stunning last decade to provide a map of this new world economic power. While in some parts of the world is experiencing stagnant growth, but this country is experiencing economic growth is high enough. This means to give new hope for many regions and countries that have economic relations with this country, not the exception of Indonesia. But this is also a concern our country and other countries, such as Asean. Therefore, the ASEAN China Free Trade Area (ACFTA), which is one of the regional agreement, have an important role in bridging the interests of Asean with China's economy, including Indonesia.

For Indonesia, ACFTA has a positive effect because the Chinese clearly requires the supply of raw materials and auxiliary materials for industry, as well as market share and a quite promising partner. However, on the other hand, our country is ready to fight the flood of products from that country. There is no other way that can be adopted to avoid the economy unless they increase the can be obtained that the competitiveness products still need to be improved, especially competitiveness of our products.

By using the SWOT analysis approach, the results through product manufacturing efficiency, while products such as pre-eminent natural resources still can be improved with the increase in value added. From the results of the analysis is also known that after ACFTA the investment of China is still relatively small.

Keyword : pre and post ACFTA, investment, Indonesia's economic strategy

<p>MAJALAH KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN ISSN 1410-3249 Volume 13 Nomor 2 Tahun 2009</p>
<p><i>Keywords used are free terms. Abstracts can be reproduced without permission or charge.</i></p>
<p>ABSTRAKSI</p>
<p>Falianty, Telisa Aulia dan Budiyanti, Eka, et. al. (Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia) <i>Analysis of The Possibility of Price Level Targetting in Indonesia to Achieve Price Stability: An Alternative to Inflation Targetting</i> Kajian Ekonomi dan Keuangan Volume 13 Nomor 2 Tahun 2009, halaman 49-84</p> <p style="text-align: center;">Abstract</p> <p><i>Price stability is one of the important macroeconomic policy goals. In recent years, price stability has become an important issue for society, especially since oil and global food prices increase continually. This phenomenon motivates this study to know, whether Inflation Targetting (IT) or Price Level Targetting that more appropriate to apply in Indonesia's monetary framework.</i></p> <p><i>IT is ignoring the deviation from past target. The average inflation rate will be convergent to the long term target. Other alternative that has been studied scientifically is price level targeting (PLT). PLT is a policy that has the effect of systematically responding to deviations of the price level from the price level target to preclude long term price level drift.</i></p> <p><i>This study will discuss possibility to apply PLT over IT in Indonesia from welfare gain side. The result from theoretical modeling, generally indicate that PLT is better to apply than IT. But empirical result using Dittmar, Gavin, and Kydland model (1999) shows that IT is better than PLT for Indonesia. It can be seen from rejection of the persistence of the output gap hypothesis in Indonesia during period of study (1983-2008). The result with secondary data also shows that IT has been quite successfully applied consistently. It can be seen by stationary inflation during period of study.</i></p> <p><i>Keywords : Inflation Targetting, Price Level Targetting, Price Stability</i></p>
<p>Aziz, Abdul, et. al. (Departemen Keuangan) Analisis Efektivitas Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada Departemen Pendidikan Nasional Kajian Ekonomi dan Keuangan Volume 13 Nomor 2 Tahun 2009, halaman 85-107</p>

MAJALAH KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN**ISSN 1410-3249****Volume 13 Nomor 2 Tahun 2009**

Keywords used are free terms. Abstracts can be reproduced without permission or charge.

ABSTRAKSI***Abstraksi***

Salah satu amanah dari Undang-Undang Keuangan Negara adalah penerapan Sistem penganggaran berbasis yang kinerja berorientasi pada hasil (output based) dari program pemerintah dengan cara meningkatkan efisiensi sumber daya yang terbatas dan efektif dalam pencapaian output dan outcomenya.

Pemerintah perlu melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi dalam mencapai target tersebut (efisien dan efektif) agar terjadi perbaikan kualitas pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang.

Salah satu metodologi penelitian untuk mengetahui tingkat efektivitas suatu program/kegiatan dengan cara melakukan uji sampel t berpasangan (paired sample t test) terhadap setiap outcome yang diharapkan dari program BOS ini.

Dari uji statistik dengan tools SPSS ini akan dihasilkan kesimpulan ilmiah setiap variabel outcomenya yaitu apakah dengan adanya program BOS variabel outcome yang diuji (yang terdiri dari variabel APK, APM, Siswa Mendaftar, Putus Sekolah, Lulus Sekolah dan Lanjut Sekolah di tingkat SD dan SMP) mengalami perbedaan yang signifikan (terjadi perbaikan) dengan sebelum pelaksanaan BOS? Atau dengankata lain, apakah BOS efektif memperbaiki variabel-variabel outcome tersebut.

Pada akhirnya, uji statistik ini bisa menjadi model / bahan masukan / pedoman bagi kementerian Negara / lembaga dan kementerian Departemen Keuangan dalam melakukan uji efektivitas program/kegiatan di lingkungannya masing-masing.

Kata Kunci: Penganggaran berbasis kinerja, Uji efektivitas outcome program BOS, Paired sample T Test, Bahan Masukan/Pedoman dalam Uji efektivitas outcome.

ANALISIS INVESTASI CHINA KE INDONESIA SEBELUM DAN SESUDAH ACFTA

Oleh : Ragimun*

Abstract

Economic growth of China's stunning last decade to provide a map of this new world economic power. While in some parts of the world is experiencing stagnant growth, but this country is experiencing economic growth is high enough. This means to give new hope for many regions and countries that have economic relations with this country, not the exception of Indonesia. But this is also a concern our country and other countries, such as Asean. Therefore, the ASEAN China Free Trade Area (ACFTA), which is one of the regional agreement, have an important role in bridging the interests of Asean with China's economy, including Indonesia.

For Indonesia, ACFTA has a positive effect because the Chinese clearly requires the supply of raw materials and auxiliary materials for industry, as well as market share and a quite promising partner. However, on the other hand, our country is ready to fight the flood of products from that country. There is no other way that can be adopted to avoid the economy unless they increase the can be obtained that the competitiveness products still need to be improved, especially competitiveness of our products.

By using the SWOT analysis approach, the results through product manufacturing efficiency, while products such as pre-eminent natural resources still can be improved with the increase in value added. From the results of the analysis is also known that after ACFTA the investment of China is still relatively small.

Key Word : pre and post ACFTA, investment, Indonesia's economic strategy

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Hubungan Indonesia-China sudah dimulai berabad-abad. Hubungan di antara kedua negara mengalami pasang surut akibat perbedaan sosial dan politik kedua negara. Khusus mengenai hubungan ekonomi perdagangan antara Indonesia dan China, sebelumnya dijalankan melalui beberapa saluran/negara perantara seperti Singapura dan Hongkong. Setelah China membuka diri dalam perdagangan internasional kemudian berubah dan berangsur-angsur terjadi perdagangan terbuka dan langsung. Kedudukan China sekarang berubah menjadi negara industri, yang mendekati kemajuan seperti halnya Jepang dan Korea Selatan. Indonesia harus dapat memanfaatkan kemajuan ekonomi dan industrialisasi China, yang membutuhkan banyak bahan industri, seperti *Crude Palm Oil* (CPO), karet, kayu, dan bahan mentah lainnya. Sektor-sektor lain yang banyak dibutuhkan

* Peneliti pada Pusat Kebijakan Ekonomi Makro, Badan Kebijakan Fiskal

negara ini antara lain juga adalah sektor energi, pangan, tambang dan produk-produk pertanian lainnya.

Pertumbuhan ekonomi negara China dekade terakhir yang sangat cepat. memberikan peluang sekaligus menjadi tantangan bagi negara kita. Demikian pula jumlah penduduk yang sangat besar sehingga konsumsi dalam negerinyapun cukup tinggi. Hal inilah yang merupakan peluang dan tantangan bagi hubungan dan strategi ekonomi Indonesia ke depan.

Negara China banyak mengimpor dan membutuhkan bahan baku (*raw material*) serta bahan penolong untuk menopang pembangunannya yang sangat pesat. Pertumbuhan ekonomi China rata-rata diatas 8%. Walaupun dengan krisis global sekarang ini turun menjadi sekitar 6%. Hal inilah yang memberikan peluang besar kepada Indonesia memasarkan berbagai sumber dayanya untuk memenuhi kebutuhan China. Oleh karenanya Indonesia seharusnya bisa memanfaatkan peluang tingginya pertumbuhan ekonomi China. Namun, sampai saat ini Indonesia masih belum mengoptimisasikan serta memanfaatkan peluang dari negara ini.

Dengan ditandatanganinya perjanjian Kawasan Perdagangan Bebas antara Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN) dan China (ACFTA) yang berlaku efektif 1 Juli 2004 secara signifikan tentu akan menguntungkan ekonomi, perdagangan dan investasi intra-regional serta akan menjadi tonggak bagi hubungan ekonomi ASEAN-China di masa datang tidak terkecuali bagi Indonesia.

1.2. Perumusan Masalah

Setelah lebih dari lima tahun ditandatanganinya perjanjian ACFTA maka tentu mempunyai banyak harapan terjadinya peningkatan investasi China ke Indonesia. Demikian juga peningkatan ekonomi perdagangan kedua belah pihak pada umumnya. Oleh karena itu penulis akan mencoba mendeskripsikan dan membandingkan investasi sebelum dan sesudah ACFTA dari kedua negara. Kemudian juga melihat peluang dan tantangan serta strategi peningkatan investasi China ke Indonesia.

1.3. Tujuan Penelitian

Menganalisis kinerja ekonomi perdagangan Indonesia dengan China terutama dilihat dari investasi China ke Indonesia sebelum dan sesudah ACFTA termasuk tantangan serta strategi menangkap peluang investasi China ke Indonesia.

1.4. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan eksploratif deskriptif dengan membandingkan investasi sebelum dan sesudah ACFTA baik peluang dan tantangan serta strategi investasi menghadapi percepatan perekonomian negara China. Bahan dan informasi didapat melalui penggalan dari berbagai sumber, antara lain dengan menggunakan data sekunder beberapa tahun sebelum dan sesudah perjanjian ACFTA. Disamping itu penelitian ini didukung dengan kajian pustaka .

2. Tinjauan Pustaka

2.1. Penetrasi Ekonomi Regional dan Internasional

Karakteristik pertumbuhan ekonomi modern mempunyai kaitan erat dengan peranan negara-negara maju. Karakteristik yang pertama berkaitan langsung dengan sejarah dan kecenderungan negara-negara kaya untuk secara terus-menerus berusaha merambah dan merentangkan ekonominya ke negara-negara lainnya. Langkah ini dilakukan guna memperoleh sumber pasokan produk primer dan bahan baku, tenaga kerja yang murah dan lokasi pemasaran yang sangat menguntungkan bagi produk-produk manufaktur mereka. Perluasan aktivitas tersebut dimungkinkan oleh adanya kemajuan teknologi modern yang begitu pesat, khususnya dalam bidang transportasi dan komunikasi.

Kegiatan perambahan yang giat dilakukan oleh negara-negara maju tersebut membawa pengaruh besar berupa terintegrasinya perekonomian dunia. Langkah-langkah tersebut membuka kemungkinan ke arah dominasi politik dan ekonomi oleh negara-negara berkembang. (Todaro, hal 103)

Dewasa ini, manuver seperti ini juga dilakukan oleh negara-negara modern baru seperti Korea Selatan dengan mengimpor bahan baku dan mengekspor barang-barang manufaktur. Demikian juga ke depan negara China sebagai kekuatan baru akan menyusul melakukan penetrasi terhadap negara lainnya. Tidak terkecuali ke Indonesia. Oleh karena itu Indonesia mesti bersiap diri dengan melakukan langkah-langkah dan strategi untuk menghadapi kekuatan ekonomi baru tersebut.

Menurut Faisal Basri (2007), pertumbuhan ekonomi China termasuk India amat cepat dibandingkan negara Asia lainnya. Selain Jepang, China dan India termasuk dalam tiga besar di kawasan Asia. Produk domestik bruto (PDB) China saat ini mencapai 31 persen. Adapun pertumbuhan ekonominya sekitar 8,9 persen pertahun. Walaupun pertumbuhan investasi di China lebih tinggi dibandingkan India. Ada beberapa alasan yang mendukung pesatnya investasi di China. Antara lain, infrastruktur China jauh lebih bagus dibandingkan India seperti sarana transportasi.

2.2. Percepatan Ekonomi Kawasan Asia Timur (*Asian Miracle*)

Kawasan Perdagangan Bebas antara Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN) dan China (ACFTA) yang berlaku efektif 1 Juli 2004 secara signifikan menguntungkan ekonomi dan perdagangan intra-regional serta akan menjadi tonggak bagi hubungan ekonomi ASEAN-China di masa datang.

Sekjen ASEAN Ong Keng Yong mengatakan bahwa pembentukan ACFTA itu dimaksudkan sebagai tonggak kerja sama antara kedua wilayah juga akan menciptakan kawasan dengan 1,7 miliar konsumen, suatu kawasan dengan produk domestik bruto (PDB) sekitar US\$ 2,0 triliun dan total perdagangan setiap tahunnya mencapai nilai US\$ 1,23 triliun.

Penghapusan rintangan perdagangan antara ASEAN dan China akan membantu menurunkan biaya, meningkatkan volume perdagangan dan meningkatkan efisiensi ekonomi. ACFTA tersebut akan menjamin stabilitas di Asia Timur dan memberikan kesempatan baik negara anggota ASEAN maupun Cina untuk mempunyai peranan lebih besar dalam perdagangan internasional yang

memberikan keuntungan bersama. Termasuk meningkatkan kerjasama antara ASEAN dan China dibidang lainnya.

Semua anggota ASEAN mengharapkan manfaat dari ACFTA. Manfaat tersebut akan tergantung pada kesiapan sektor swasta di setiap negara untuk mengeksploitasi berbagai kesempatan dalam ACFTA. Berdasarkan ACFTA, negara-negara anggota ASEAN dan China terbebas dari pajak atas 7.000 kategori komoditi dan memberikan status bebas bea bagi semua komoditi tersebut dalam perdagangan bilateral pada 2010.

2.3. Peranan Investasi Dalam Pembangunan

Perekonomian antar negara semakin berkaitan erat, keadaan ekonomi di sebuah negara dengan cepat dan mudah merambah ke negara-negara lain. Dalam situasi seperti sekarang, keunggulan bisnis dan perekonomian bukan lagi berdasarkan pada strategi keunggulan komparatif (*comparative advantage*) melainkan strategi keunggulan kompetitif (*competitive advantage*). Globalisasi mengubah struktur perekonomian dunia secara fundamental. Interdependensi (saling ketergantungan) perekonomian negara semakin erat, keeratan interdependensi ini bukan saja berlangsung antara negara maju, tapi juga antara negara berkembang dan negara maju.

Ekspor merupakan salah satu sumber devisa yang sangat dibutuhkan oleh negara atau daerah yang perekonomiannya bersifat terbuka seperti di Indonesia, karena ekspor secara luas ke berbagai negara memungkinkan peningkatan jumlah produksi yang mendorong pertumbuhan ekonomi sehingga diharapkan dapat memberikan andil yang besar terhadap pertumbuhan dan stabilitas perekonomiannya. Apalagi Indonesia yang baru saja bangkit dari keterpurukan akibat krisis ekonomi dan krisis multidimensional senantiasa berupaya untuk mengembangkan ekspornya untuk menopang pemulihan ekonomi melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui masuknya investasi yang didukung pula dengan jaminan pemerataan, stabilitas serta kepastian hukum.

Pembangunan memerlukan modal yang relatif besar. Akan tetapi di sisi lain, kemampuan negara untuk menyediakan dana modal guna mempercepat pembangunan sangatlah terbatas. Oleh sebab itu, salah satu aspek dalam kebijakan pembangunan negara berkembang perlu melakukan usaha-usaha untuk memperoleh lebih banyak dana. Salah satu diantaranya adalah meningkatkan investasi baik dari dalam atau luar negeri.

Berdasarkan sumber modal yang akan digunakan untuk pembangunan, usaha pengerahan modal (investasi) untuk pembangunan dapat di bedakan kepada pengerahan modal dalam negeri dan pengerahan modal luar negeri. Modal yang berasal dalam negeri biasanya berasal dari tiga sumber yakni tabungan sukarela masyarakat, tabungan pemerintah dan tabungan paksa. Hampir semua negara berkembang merasakan bahwa tabungan sukarela dan tabungan pemerintah adalah tidak cukup untuk membiayai program yang direncanakan dan untuk mencapai tingkat pertumbuhan tertentu. Kekurangan ini dapat dipenuhi dari modal luar negeri.

Investasi dari luar negeri dapat dibedakan dalam dua jenis, yaitu bantuan luar negeri dan penanaman modal asing. Bantuan dari luar negeri dapat bersumber dari pemerintah, badan-badan internasional atau pihak swasta. Manfaat dari adanya investasi asing / luar negeri ini memungkinkan suatu negara mencapai

target-target pembangunan. Maka apabila modal yang diperlukan untuk melaksanakan pembangunan yang direncanakan adalah lebih besar dari pada modal yang dapat dikerahkan di dalam negeri, usaha pengerahan modal (investasi) dari luar negeri perlu dilakukan. Manfaat lain investasi dari luar negeri adalah diikuti oleh pemasukan teknologi modern dan pengaliran tenaga-tenaga ahli. Faktor ini dapat mempercepat proses modernisasi di sektor-sektor yang menerima modal asing tersebut dan mengisi tenaga-tenaga ahli yang diperlukan. Dengan demikian modal luar negeri bukan hanya akan mengatasi masalah kekurangan modal untuk membiayai pembangunan, tetapi juga dapat mempertinggi efisiensi pelaksanaan pembangunan. (Muhamad Faishol, 2008)

2.4. Perkembangan Kebijakan Perdagangan Indonesia

Sejak terbentuknya World Trade Organisation (WTO) tahun 1995, perkembangan perdagangan dunia mengalami pertumbuhan sangat pesat. Jaringan produksi mendunia dan China muncul sebagai kekuatan produksi dan perdagangan yang menakjubkan. Perubahan pola perdagangan dunia ini ikut mempengaruhi kinerja perdagangan Indonesia.

Lingkungan perdagangan internasional yang berubah sangat cepat dimana kekuatan globalisasi perdagangan dan aliran modal sangat kuat, maka kebijakan yang ditempuh seyogyanya harus tetap memperhatikan kepentingan domestik. Keberhasilan reformasi dan deregulasi perdagangan sangat ditentukan oleh faktor-faktor :

1. penekanan pada kompetisi
2. pendekatan yang gradual.

Secara ringkas perkembangan kebijakan perdagangan Indonesia dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 1.
Perkembangan Kebijakan Perdagangan Indonesia

Periode	Kebijakan
1948-1966	Ekonomi nasionalis, nasionalisasi perusahaan Belanda
1967-1973	Sedikit liberalisasi perdagangan
1974-1981	Substitusi impor, booming komoditas primer dan minyak
1982-sekarang	Liberalisasi perdagangan dan orientasi ekspor

Sumber: Nurhemi, Kerjasama Perdagangan Internasional, 2007, diolah.

2.5. Keunggulan Komparasi (*Comparative Advantage*)

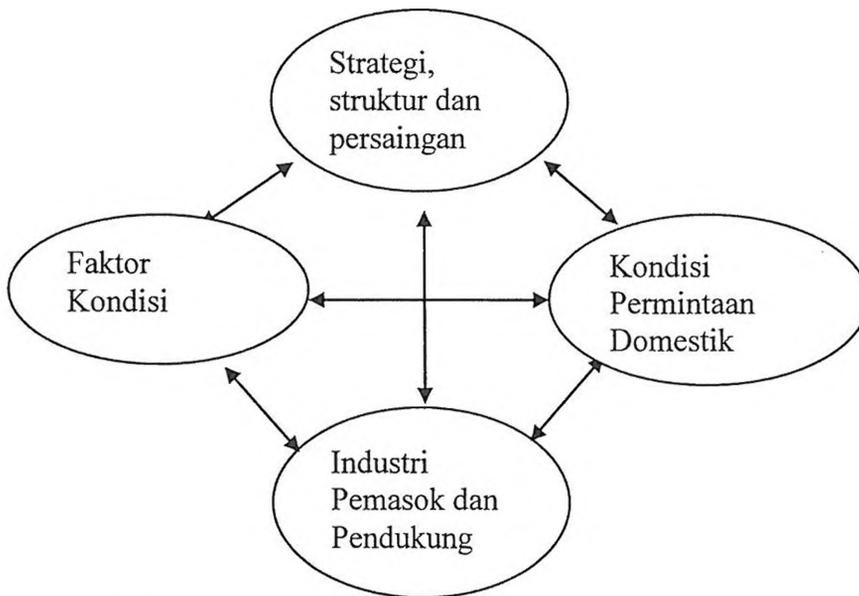
Michael Porter dalam bukunya *The Competitive Advantage of Nations* (1998) mengembangkan sebuah model yang membantu kita menjawab pertanyaan mengapa sejumlah negara lebih kompetitif daripada negara lain dan mengapa sejumlah perusahaan yang berlokasi di negara-negara tertentu lebih kompetitif dari pada perusahaan negara lain. Model ini menyatakan bahwa lokasi pusat kegiatan (*national home base*) perusahaan-perusahaan sangat berpengaruh

terhadap daya kompetisi perusahaan-perusahaan tersebut di persaingan internasional. *Home base* ini menyediakan faktor-faktor dasar yang dapat mendorong ataupun sebaliknya menghambat daya kompetisi perusahaan-perusahaan. Porter membedakan empat faktor dasar :

1. Faktor kondisi
2. Faktor Permintaan Domestik
3. Faktor Industri Pendukung, dan
4. Faktor Strategi, struktur dan persaingan.

Keempat faktor ini saling berkaitan dan secara visual seperti bentuk *diamond*, sehingga dikenal *teori diamond*, dan dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 1.
Teori Diamond



Sumber : Porter, 1998

Faktor-faktor ini umumnya merupakan kondisi awal dan dasar yang dimiliki oleh suatu negara. Negara tersebut dapat mengembangkan industri-industri tertentu dengan memanfaatkan kondisi dasar ini dengan optimal. Dalam kaitan ini, kita mengenal kemudian istilah negara dengan biaya produksi rendah (*low cost countries*).

Faktor permintaan domestik adalah hal-hal yang terkait dengan permintaan terhadap barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara. Mereka berpengaruh terhadap kecepatan dan arah dari inovasi dan pengembangan produk.

Faktor industri-industri pendukung adalah keberadaan atau pun ketiadaan industri-industri pemasok dan pendukung yang kompetitif dalam persaingan internasional. Industri pemasok yang kompetitif secara internasional akan memperkuat inovasi dan internasionalisasi industri utama pada fase

perkembangan berikutnya. Industri pendukung adalah industri yang dapat memanfaatkan kegiatan bisnis tertentu secara bersama-sama dengan industri utama.

Faktor strategi, struktur, dan persaingan perusahaan merujuk pada kondisi yang berpengaruh terhadap hal-hal yang terkait dengan bagaimana perusahaan-perusahaan di suatu negara.

Teori *Diamond* dapat digunakan dalam berbagai tataran. Dalam tataran nasional, pemerintah dapat merumuskan strategi untuk memperkuat keunggulan kompetitif negara, yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan nasional negara tersebut dalam kancah persaingan internasional. Menurut Porter, pemerintah bisa memperkuat keunggulan kompetitif dengan melakukan standarisasi kualitas produk nasional, menyusun baku mutu lingkungan dan keuangan, serta mendorong kerja sama vertikal antara pemasok dan pembeli di pasar domestik.

2.6. Analisis Daya Saing Produk Ekspor

Tingkat daya saing komoditas ekspor suatu negara atau industri dapat dianalisis dengan berbagai macam metode atau diukur dengan sejumlah indikator. Salah satu diantaranya adalah *Revealed Comparative Advantage*, *Constant Market Share* dan *Real Effective Exchange Rate*. Disamping itu seperti halnya laporan tahunan dari *World Economic Forum* (WEF) mengenai *Global Competitiveness Index* dapat juga sebagai ukuran daya saing suatu negara setiap tahunnya. GCI adalah indeks gabungan dari sejumlah indikator ekonomi yang telah teruji secara empiris memiliki korelasi positif dengan pertumbuhan ekonomi (PDB) untuk jangka menengah dan panjang. Secara teoritis juga mempunyai korelasi positif dengan kinerja atau tingkat daya saing ekspor.¹

Globalisasi pada dasarnya adalah fenomena yang mendorong perusahaan di tingkat mikro ekonomi untuk meningkatkan efisiensi agar mampu bersaing di tingkat lokal, nasional, regional maupun internasional. Dengan globalisasi yang menyatukan pasar dan kompetisi investasi internasional meningkatkan tantangan sekaligus peluang bagi semua perusahaan baik kecil, menengah maupun besar.

Daya saing adalah kemampuan perusahaan, industri, daerah, negara, atau antar daerah untuk menghasilkan faktor pendapatan dan faktor pekerjaan yang relatif tinggi dan berkesinambungan untuk menghadapi persaingan internasional (sumber : OECD). Oleh karena daya saing industri merupakan fenomena di tingkat mikro perusahaan, maka kebijakan pembangunan industri nasional didahului dengan mengkaji sektor industri secara utuh sebagai dasar pengukurannya.

Untuk melihat lebih detail komoditas Indonesia yang bersaing dengan negara-negara lain di pasar dunia dapat diukur dari *Revealed Comparative Advantage (RCA)* masing-masing produk ekspor (*Balassa, 1965*). Perhitungan RCA ini menggunakan data yang dikelompokkan dalam *Standard Industrial Trade Classification (SITC)* 2 digit. Nilai RCA yang lebih besar dari 1 menunjukkan daya saing yang kuat. Semakin tinggi komoditi, maka semakin tangguh daya saing produk tersebut, sehingga disarankan untuk terus dikembangkan dengan melakukan spesialisasi pada komoditi tersebut. Perhitungan RCA digunakan rumusan sebagai berikut :

¹ Tulus Tambunan, *Perdagangan Internasional*, 2000, hal 90

$$RCA = \frac{(Xia)/(totalXa)}{(Xiw)/(totalXw)} \dots\dots\dots 2$$

Dimana :

X = Ekspor atau nilai ekspor

i = jenis komoditi

a = negara asal

w= dunia (world)

Bila RCA < 1 atau sampai mendekati 0, maka daya saingnya lemah.

Bila RCA > 1 maka daya saingnya kuat, semakin tinggi RCA semakin tangguh daya saingnya.

Salah satu indikator yang dapat menunjukkan perubahan keunggulan komparatif adalah *RCA index*. Indeks ini menunjukkan perbandingan antara pangsa ekspor komoditas atau sekelompok komoditas suatu negara terhadap pangsa ekspor komoditas tersebut dari seluruh dunia. Dengan kata lain indeks RCA menunjukkan keunggulan komparatif atau daya saing ekspor dari suatu negara dalam suatu komoditas terhadap dunia.

Jika nilai indeks RCA dari suatu negara untuk komoditas tertentu lebih besar dari 1, berarti negara yang bersangkutan mempunyai keunggulan komparatif di atas rata-rata dunia dalam komoditas tersebut. Sebaliknya, bila lebih kecil dari 1 berarti keunggulan komparatifnya untuk komoditas tersebut rendah atau di bawah rata-rata dunia.

3. PEMBAHASAN

3.1. Perkembangan Investasi China ke Indonesia Sebelum dan Sesudah ACFTA

Perjanjian kerja sama ekonomi antara *Association of Southeast Asian Nations* (Asean) dan China (ACFTA) ditandatangani pada tanggal 4 November 2004 di Phnom Penh, Kamboja oleh para Kepala Negara ASEAN dan RRC. Tujuan perjanjian utama ACFTA adalah (a) memperkuat dan meningkatkan kerjasama perdagangan kedua pihak; (b) meliberalisasikan perdagangan barang dan jasa melalui pengurangan atau penghapusan tarif; (c) mencari area baru dan mengembangkan kerjasama ekonomi yang saling menguntungkan kedua belah pihak; dan (d) memfasilitasi integrasi ekonomi yang lebih efektif dengan negara anggota baru ASEAN dan menjembatani *gap* yang ada di kedua belah pihak.

Kerja sama ekonomi dan perdagangan kedua belah pihak akan mempengaruhi kedua kawasan tersebut. Demikian juga bagi Indonesia, di masa mendatang akan semakin dipengaruhi hubungan ekonomi internasional, yang berupa kesepakatan ekonomi bilateral, regional dan multilateral serta konvensi dan perjanjian internasional. Perkembangan ekonomi dan perdagangan dengan China yang mempunyai pertumbuhan tinggi dan menjadi kekuatan baru akan sangat mempengaruhi perdagangan dan investasi bagi Indonesia. Negara-negara

² Ibid, hal 98

tersebut mulai menuju sebagai negara yang mempunyai keunggulan komparasi dalam produk-produk tertentu. Produk-produk mereka telah masuk di berbagai negara di dunia ini termasuk Indonesia. Struktur perekonomiannya mulai meninggalkan sektor pertanian menuju industrialisasi dan mulai banyak menanamkan modalnya di berbagai negara.

Perkembangan ekonomi perdagangan Indonesia dan China banyak mengalami pasang surut. Naik turun hubungan ekonomi dagang kedua negara karena di pengaruhi beberapa permasalahan seperti faktor sosial ekonomi dan politik. Sejak negara China mengubah haluan menjadi negara terbuka maka Indonesia mempunyai kepentingan ekonomi dan perdagangan pada negara China. Jaringan ekonomi dan perdagangan ini kemudian diimplementasikan melalui bentuk kerjasama ekonomi baik bilateral maupun regional. Salah satu diantaranya adalah kerjasama regional Asean dengan China. Tentu saja perkembangan China yang sangat pesat saat ini menjadi peluang dan tantangan khususnya bagi Indonesia dan negara-negara Asean lainnya.

Terjadinya krisis finansial global sejak akhir tahun 2008 yang berlanjut pada 2009 mengakibatkan banyak negara mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi. Demikian juga pertumbuhan ekonomi China selama tahun 2008 ini tercatat menurun hanya mencapai 8%, atau menurun dibanding tahun lalu.

China merupakan tujuan utama kelima ekspor Indonesia ke pasar internasional. Total volume perdagangan bilateral Indonesia-China hingga akhir tahun 2007 menembus angka US\$25,01 miliar, atau melampaui target yang ditetapkan sebesar US\$20 miliar. Namun, pada periode itu, Indonesia mencatatkan defisit sebesar US\$210 juta.

Dari sisi investasi, China mempunyai kontribusi sekitar 0,3% dari total investasi asing (*foreign direct investment/FDI*) setiap tahunnya pada Indonesia. Perkembangan realisasi investasi China ke Indonesia sebelum dan sesudah ditanda tangannya *Asean-China Free Trade Area (ACFTA)* dapat dilihat pada tabel 2 sebagai berikut :

Tabel 2.
Perkembangan Realisasi Investasi China ke Indonesia 2001-2007
(juta US\$)

Negara	Tahun							
	2002	2003	2004	Rata-rata	2005	2006	2007	Rata-rata
Asean	299.2	464.1	916.2	559.83	2,250.00	926.7	330.5	1,169.07
China	6	83.2	8.1	32.43	37.3	31.5	4.8	24.53
Jepang	432.3	738.2	1,041.30	737.27	1,144.30	908.2	210.4	754.30
Amerika	60.3	148.4	78.3	95.67	88.6	65.8	123.5	92.63
Total dunia	3091.2	5450.6	4601.3	4381.0	8914.6	5976.9	3706.0	6199.2
% Inv. China ke Indonesia	0.002	0.015	0.002	0.01	0.004	0.005	0.001	0.004

sumber : BKPM, 2008

*) diluar investasi sektor minyak & gas umi
data terakhir sampai dengan 31 Mei 2007

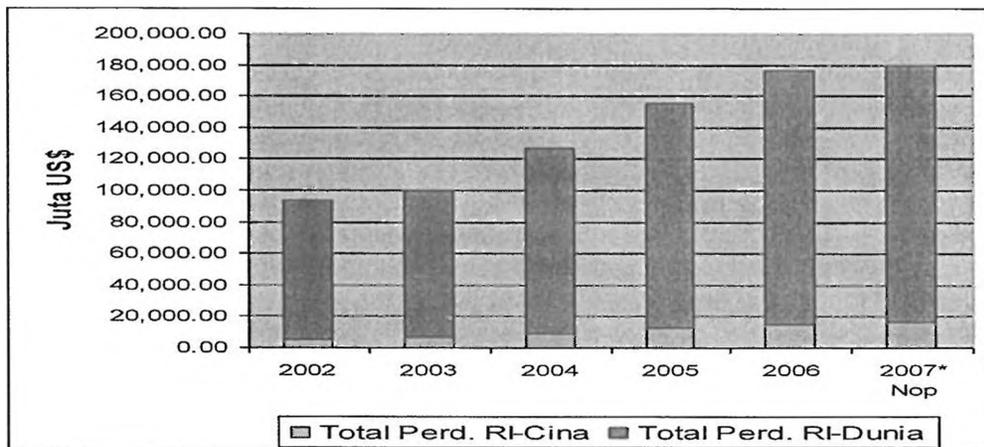
Secara umum investasi negara-negara Asean, Jepang, Amerika Serikat lebih tinggi dibandingkan dengan investasi China ke Indonesia. Sebelum perjanjian ACFTA investasi negara-negara Asean ke Indonesia 18 kali lipat dengan rata-rata 559,83 juta US\$ dan 48 kali lipat sesudah perjanjian ACFTA dengan nilai rata-rata 1.169,07 juta US\$. Sedangkan rata-rata investasi China ke Indonesia sebesar 32,43 juta US\$ sebelum perjanjian ACFTA dan menurun menjadi sebesar 24,53 juta US\$.

Hal tersebut dapat dikatakan juga bahwa persentase investasi China ke Indonesia dibandingkan dengan total investasi dunia ke Indonesia masih sangat kecil, sesudah perjanjian ACFTA hanya rata-rata sebesar 0,004 sedangkan sebelumnya rata-rata sebesar 0,01.

Dari tabel di atas tidak terlihat peningkatan investasi China ke Indonesia setelah dibukanya perdagangan bebas ACFTA, justru mengalami penurunan dari rata-rata 32,43 juta US\$ menjadi 24,52 juta US\$.

Apabila dilihat dari sisi perdagangan, dari gambar 2 kita dapat membandingkan total perdagangan Indonesia - China dengan total perdagangan Indonesia - dunia. Total perdagangan Indonesia - China selama tahun 2002 sampai dengan 2007 selalu mengalami peningkatan walaupun nilainya tidak lebih dari US\$20.000. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa proporsi China dalam perdagangan internasional bagi Indonesia masih relatif kecil. Sebagaimana diilustrasikan pada gambar 2 di bawah ini.

Gambar 2.
Total Perdagangan Indonesia - Cina dan Indonesia-Dunia



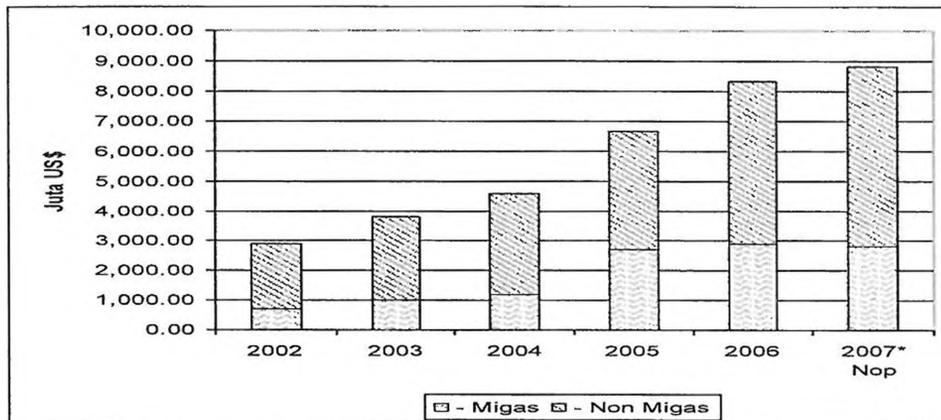
Sumber : BKPM, 2008, diolah

Berkaitan dengan kegiatan perdagangan China Indonesia dapat ditunjukkan bahwa nilai ekspor Indonesia ke China banyak didominasi oleh ekspor migas. Sedangkan bila dibandingkan peningkatan pertumbuhan beberapa komoditi nonmigas lainnya seperti hasil pertanian dan perkebunan, hasil perikanan, kayu olahan, tekstil dan beberapa komoditas lainnya ternyata masih relatif kecil. Hampir setengah dari total ekspor Indonesia ke China adalah dari sektor migas. Hal ini juga menunjukkan kontribusi ekspor dari sektor nonmigas relatif belum berhasil.

Sebagaimana ditunjukkan pada gambar 3, ekspor sektor migas selalu meningkat demikian juga ekspor nonmigas.

Gambar 3.

Ekspor Migas dan Nonmigas ke Cina (Juta US\$)



Sumber : BKPM 2008, diolah

3.2. Optimalisasi Investasi China ke Indonesia

Sudah hampir lima tahun, sejak tahun 2004 sampai saat ini kerja sama ekonomi negara-negara Asean dengan China dalam bentuk *Asean - China Free Trade Area* (ACFTA) berlangsung. Kerja sama ini tentu mempunyai tujuan yang sangat ideal mengingat China sebagai negara yang mempunyai tingkat pertumbuhan ekonomi tertinggi di dunia sekarang ini. Dengan penduduk 1,2 milyar ditambah dengan penduduk Asean sekitar 500 juta maka menjadi sekitar 1,7 milyar penduduk dua kawasan ini. Penduduk yang sangat besar ini tentu menjadi pasar empuk produk dan jasa kedua belah pihak. Tujuan lainnya adalah meliberalisasi perdagangan barang dan jasa melalui pengurangan atau penghapusan tarif serta mengembangkan kerjasama ekonomi yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Termasuk memfasilitasi integrasi ekonomi yang lebih efektif kedua belah pihak.

Hubungan perdagangan bilateral Indonesia China sendiri sebetulnya cukup bagus. Setelah pelaksanaan ACFTA, Indonesia mencatat surplus perdagangan dengan China. Kalau kita bandingkan surplus perdagangan sebelum penandatanganan perjanjian ini rata-rata hanya mencapai US\$ 608 pertahun, tetapi setelah pelaksanaan perjanjian naik menjadi US\$ 1.160 pertahun, atau hampir dua kali lipat. Demikian juga kita mencatat peningkatan *share* perdagangan Indonesia-China terhadap total perdagangan semua negara dengan Indonesia pada era pelaksanaan ACFTA. Rata-rata *share* total perdagangan Indonesia-China terhadap total perdagangan semua negara dengan Indonesia sebelum ACFTA 6,87 persen, meningkat menjadi 9,40 persen pada pasca ACFTA. Atau bisa dikatakan telah terjadi pergeseran *share* sebesar 2,53 persen total perdagangan Indonesia-negara lain beralih ke Indonesia-China pada pasca ACFTA. Pada ekspor terjadi pergeseran *share* sebesar 2,29 persen dan impor sebesar 2,81 persen beralih ke Cina pada era pelaksanaan ACFTA. Sebagaimana Tabel 3.

Tabel 3.
Perbandingan perdagangan Indonesia-Cina
terhadap Indonesia-Total Negara (Persen)

	Sebelum	Pasca ACFTA	Pergeseran
Ekspor	5.91	8.20	2.29
Impor	8.55	11.37	2.81
Neraca Perdag.	2.27	3.15	0.88
Total Perdag.	6.87	9.40	2.53

Sumber : BPS, (diolah)

Dari sisi ekspor, rata-rata ekspor pada pasca ACFTA juga mengalami kenaikan berarti dibanding sebelum pelaksanaan ACFTA. Sebelum pelaksanaan ACFTA rata-rata ekspor per tahun hanya mencapai US\$ 3.770 per tahun, kemudian naik menjadi US\$ 7.940 per tahun pasca ACFTA. Ekspor migas sebelum pelaksanaan ACFTA rata-rata hanya sebesar US\$ 954 per tahun, naik menjadi US\$ 2.794 per tahun pasca ACFTA atau naik hampir tiga kali lipat. Disisi lain, ekspor nonmigas sebelum pelaksanaan ACFTA sebesar US\$ 2.815 per tahun, kemudian naik menjadi US\$ 5.146 per tahun pada era pelaksanaan ACFTA.

Tabel 4.
Rata-rata Perdagangan Indonesia Sebelum
dan Era ACFTA (US\$)

Komponen	Sebelum	Era ACFTA
Ekpor	3,770.07	7,940.79
- Migas	954.70	2,794.38
- Nonmigas	2,815.37	5,146.41
Impor	3,162.06	6,780.98
- Migas	563.98	1,001.87
- Nonmigas	2,598.08	5,779.11
Neraca Perdag.	608.01	1,159.81
- Migas	390.72	1,792.51
- Nonmigas	217.29	-632.70
Total Perd.	6,932.13	14,721.78
- Migas	1,518.68	3,796.25
- Nonmigas	5,413.45	10,925.53

Sumber : BPS, (diolah)

Hal yang menarik diamati adalah pertumbuhan ekspor nonmigas lebih rendah dibanding pertumbuhan ekspor migas ke China. Hal inilah yang perlu diperhatikan pemerintah. Ini berarti kita belum berhasil meningkatkan ekspor nonmigas ke China baik dari segi jumlah maupun nilai ekspor itu sendiri.

Apabila dilihat dari sisi impor, rata-rata impor sebelum pelaksanaan ACFTA sebesar US\$ 3.162 per tahun, naik menjadi US\$ 6.780 per tahun pada pelaksanaan ACFTA. Impor migas sebelum pelaksanaan ACFTA rata-rata US\$ 563 per tahun, naik menjadi US\$ 1.001 per tahun pada pelaksanaan ACFTA. Sementara itu, impor nonmigas sebelum pelaksanaan ACFTA sebesar US\$ 2.598 per tahun, menjadi US\$ 5.779 pada era pelaksanaan ACFTA. Sedangkan pertumbuhan impor migas lebih rendah dibanding pertumbuhan impor nonmigas.

Menurut data BKPM, perkembangan realisasi investasi China ke Indonesia sebelum dan sesudah ditanda-tanganinya *Asean-China Free Trade Area* (ACFTA) dapat dilihat dari realisasi investasi Cina ke Indonesia. Rata-rata jumlah investasi yang masuk pada era pelaksanaan ACFTA sebanyak 14,67 proyek per tahun, hampir dua kali lipat dibandingkan jumlah investasi sebelum pelaksanaan ACFTA yang rata-rata sebesar hanya sebesar 7,67 per tahun. Namun demikian, dari nilai investasi tidak terjadi peningkatan yang signifikan. Rata-rata realisasi investasi Cina di Indonesia pada era ACFTA sebesar US\$ 35,17, tidak jauh berbeda dibanding sebelum pelaksanaan ACFTA yang besarnya US\$ 32,43.

Tabel 5.
Perkembangan Realisasi Investasi (proyek) China dan Total Dunia

	2002	2003	2004	2005	2006	2007
China						
- Jml. Proyek -Cina	5	12	6	11	11	22
- Invest. Cina (Juta US\$)	6.00	83.20	8.10	45.10	31.50	28.90
Dunia						
-Jml. Proyek -Dunia	442	569	547	908	867	983
- Investasi - Dunia (Juta US\$)	3,082.6	5,445.3	4,572.1	8,916.9	5,977.0	10,349.6
Persentase (Cina thd Total)						
-Jml. Proyek	1.1%	2.1%	1.1%	1.2%	1.3%	2.2%

Sumber : BKPM (diolah)

Kalau dilihat dampak ditandatangani perjanjian justru belum mempunyai pengaruh besar terhadap arus iklim investasi China ke Indonesia walaupun terjadi kenaikan. Justru investasi negara-negara Asean, Jepang, ataupun Amerika Serikat jauh lebih tinggi dibandingkan dengan investasi China ke Indonesia. Dari data BKPM menunjukkan bahwa sebelum perjanjian ACFTA investasi negara-negara Asean ke Indonesia 18 kali lipat dengan rata-rata 559,83 juta US\$ dan 33 kali lipat sesudah perjanjian ACFTA dengan nilai rata-rata 1.169,07 juta US\$. Sedangkan rata-rata investasi China ke Indonesia sendiri hanya sebesar 32,43 juta US\$

sebelum perjanjian ACFTA dan menjadi rata-rata hanya sebesar 32,57 juta US\$ pasca ACFTA.

Demikian juga persentase investasi China ke Indonesia dibandingkan dengan total investasi dunia ke Indonesia masih kecil, sesudah perjanjian ACFTA hanya rata-rata sebesar 0,006 sedangkan sebelumnya juga rata-rata sebesar 0,006. Dengan melihat kondisi seperti itu, semestinya pemerintah lebih agresif dan lebih kreatif untuk mendorong masuknya investor China ke Indonesia.

Membentuk sebuah forum yang mengakomodir semua kepentingan dengan jalan mengundang sebanyak mungkin investor China untuk menanamkan modalnya di Indonesia adalah salah satu cara yang dapat dilakukan. Tentu saja forum ini menjembatani antara investor China dengan Indonesia.

Langkah yang dapat ditempuh, bisa saja dengan segera merealisasikan forum investasi pemerintah pusat, swasta serta pemda-pemda. Sebetulnya masih banyak sektor yang dapat ditawarkan kepada mereka terutama sektor energi, industri, infrastruktur, pertanian, kehutanan maupun kelautan.

Hal lain yang dianggap penting adalah kesiapan infrastruktur serta dunia usaha kita dalam menangkap peluang yang masih terbuka lebar untuk merealisasikan dan mengeksplorasi berbagai kegiatan yang ada dalam perjanjian ACFTA tersebut. Oleh karena jangan sampai peluang ini hanya banyak dimanfaatkan oleh negara-negara Asean lainnya, seperti Singapura, Malaysia atau Thailand.³

3.3. Peluang dan Hambatan Investasi China ke Indonesia China Setelah Pembentukan ACFTA

3.3.1. Peluang

Indonesia mempunyai peluang cukup besar untuk meningkatkan investasi dari China. Hal ini didukung peningkatan volume maupun komoditas yang dapat di ekspor ke negara China sebagai kekuatan ekonomi baru. Selama ini tercatat sebesar 7,2% ekspor nonmigas Indonesia adalah ke China. Memasok kebutuhan (*raw material*, barang industri, tenaga kerja) untuk negara China adalah peluang paling utama. Faktor peluang utama lainnya adalah keunggulan Indonesia karena mempunyai sumber-sumber yang melimpah. Dengan berbagai peluang ini tentu investor China akan tertarik untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

Demikian juga jumlah penduduk China yang lebih dari 1,3 miliar jiwa sangat mempengaruhi permintaan komoditi ekspor unggulan Indonesia. Dampaknya harga komoditi seperti bahan pangan akan cenderung tinggi karena permintaan juga tinggi, dan bagi Indonesia dapat menyediakan sumber daya alam tersebut untuk memenuhi kebutuhan mereka karena Indonesia memiliki keunggulan sumber daya alam yang melimpah.

Adapun cara yang ditempuh adalah mencari *niche* (pasar khusus) Kawasan Perdagangan Bebas antara Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN) dan China (ACFTA) yang secara signifikan menguntungkan ekonomi dan perdagangan intra-regional serta akan menjadi tonggak bagi hubungan ekonomi ASEAN-China di masa datang.

³Sumber: www.sinarharapan.co.id/berita/0804/24/opi01.html

Pembentukan ACFTA itu akan menciptakan kawasan dengan 1,7 miliar konsumen, suatu kawasan dengan produk domestik bruto (PDB) sekitar US\$ 2,0 triliun dan total perdagangan setiap tahunnya mencapai nilai US\$ 1,23 triliun. Penghapusan rintangan perdagangan antara ASEAN dan China akan membantu menurunkan biaya, meningkatkan volume perdagangan dan meningkatkan efisiensi ekonomi.

ACFTA tersebut akan menjamin stabilitas di Asia Timur dan memberikan kesempatan baik negara anggota ASEAN maupun Cina untuk mempunyai peranan lebih besar dalam perdagangan internasional yang memberikan keuntungan bersama. Semua anggota ASEAN mengharapkan manfaat dari ACFTA namun tingkat manfaat tersebut akan tergantung pada kesiapan sektor swasta di setiap negara untuk mengeksplorasi berbagai kesempatan dalam ACFTA.

Berdasarkan ACFTA, negara-negara anggota ASEAN dan Cina terbebas dari pajak atas 7.000 kategori komoditi mulai 1 Juli 2004 dan memberikan status bebas bea bagi semua komoditi tersebut dalam perdagangan bilateral pada 2010. Dilihat sebagai antisipasi banyaknya pengembangan di negara Cina sebagai tujuan investasi paling menarik di kawasan Asia. Tujuannya adalah menjadikan Cina tidak sebagai saingan tapi lebih menjadikannya sebagai mitra kerja sama dan meningkatkan kualitas produk kita yang berasal dari sumber alam (*natural reseources*).

Untuk bisa melepaskan diri dari ketergantungan ekonomi dua kekuatan ekonomi dunia yang baru itu, Indonesia harus meningkatkan daya saingnya di pasar dunia dan menciptakan pasar khusus (*niche*) bagi produk Indonesia. Posisi Indonesia mengenai daya saing pada tahun 2008-2009 menurut versi *World Economic Forum* (WEF) adalah di urutan 55 sedangkan China 30. Tiga negara Asean lainnya justru lebih baik Singapura urutan 5, Malaysia 21, Thailand 34.⁴

Saat ini dengan membanjirnya barang-barang produk China akan membuat persaingan beberapa negara di kawasan Asia Tenggara sebagai negara industri baru, sehingga mendorong memproduksi dan menonjolkan produk-produk yang mempunyai keunggulan komparasi.

Antisipasi dalam jangka panjang untuk menghadapi dampak pertumbuhan ekonomi China adalah Indonesia bersama negara Asean lainnya membentuk kekuatan ekonomi regional. Ini dapat dilakukan dengan terus melanjutkan kesepakatan-kesepakatan bersama dalam dunia perdagangan untuk menstabilkan kawasan ini. Disamping itu, terus dijajagi kemungkinan penggunaan mata uang tunggal (*single currency*) di kawasan Asean.

Pada umumnya, pertumbuhan ekonomi yang pesat suatu negara akan mengangkat golongan menengah ke atas menjadi golongan atas. Golongan ini tentu memerlukan tempat-tempat wisata diluar negeri. Oleh karena itu, Indonesia dapat menangkap peluang membanjirnya wisatawan dari negara-negara tersebut melalui peningkatan kualitas layanan daerah wisata (*tourism area*) maupun banyaknya tempat wisata.

⁴Sumber: www.weforum.org/en/initiatives/gcp/Global%20Competitiveness%20Report/index.html

3.3.2. Hambatan / tantangan

Peningkatan daya saing Indonesia dapat terlihat dari banyaknya investasi yang masuk. Untuk itu, pemerintah melakukan reformasi sistem pemerintahan. Lima hal yang merupakan hambatan peningkatan investasi China ke Indonesia antara lain, diperlukan tenaga kerja yang murah, peningkatan layanan pabean yang cepat, peningkatan efisiensi jasa pendukung yang tinggi terutama terkait masalah telekomunikasi dan transportasi, serta kepastian hukum, demikian juga layanan pemerintah.

Faktor-faktor penghambat bisnis lainnya adalah inflasi, etika kerja dari tenaga kerja buruk, pemerintahan yang tidak stabil, tingginya kriminalitas, regulasi valas, akses ke keuangan, tarif pajak, regulasi tenaga kerja restriktif, kebijakan yang tidak stabil, kualitas SDM buruk, korupsi, regulasi perpajakan, infrastruktur buruk dan birokrasi tidak efisien. (WEF, 2005)

3.4. Strategi Pengembangan Investasi China ke Indonesia

Munculnya pesaing baru dalam investasi dan perdagangan internasional seperti China, Vietnam maupun India memberikan pelajaran serta strategi guna menarik investor ke Indonesia. Ada beberapa sarana dan prasarana yang sangat diperlukan guna menarik investor menanamkan investasinya di Indonesia. Revitalisasi sarana dan prasarana tersebut antara lain :

3.4.1. Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur merupakan kunci utama dalam keberhasilan pembangunan ekonomi dan perdagangan nasional, sekaligus mampu menciptakan dan mendorong tersedianya lapangan kerja yang luas bagi masyarakat serta menciptakan *multiplier effect*. Dampaknya pada ekonomi pun sangat luas.

Indonesia perlu meningkatkan alokasi dana guna pembangunan infrastrukturnya. Sebagai perbandingan saja, Cina membelanjakan 6.9% dari GDP-nya untuk membangun infrastruktur, bandingkan dengan negara berkembang lainnya yang rata-rata membelanjakan sekitar 6.3% (*low income*) dan 3.6% (*middle income*). Sementara kondisi Indonesia saat ini sudah jauh menurun ke angka sekitar 2% dari GDP. Kita berharap melalui pembangunan infrastruktur yang dicanangkan pemerintahan sekarang dapat kembali pada tingkat 5% GDP, sama halnya dengan kondisi sebelum krisis.

Disamping itu segera merealisasikan pernyataan dan kesepakatan bersama antara negara-negara Asean dengan China terkait kerjasama transportasi yang tertuang dalam rencana strategis "*Asean-China Maritime Transport Agreement*". Hal ini penting karena fungsi pelabuhan sebagai penghubung utama dalam rantai pergerakan logistik regional maupun internasional. Selain itu untuk mempercepat pengembangan pelabuhan dan memenuhi kebutuhan untuk peningkatan perekonomian, perlu dibentuk mekanisme koordinasi pelabuhan ASEAN-China, agar terwujud implementasi yang efektif pada aktivitas kerjasama bidang-bidang yang relevan. Dengan begitu minat investasi ke tanah air akan meningkat.

3.4.2. Iklim Investasi

Investasi dipercaya sebagai stimulan perekonomian. Sedangkan untuk meningkatkan investasi dari China ke Indonesia sangat diperlukan iklim investasi yang kondusif. Menurut Stern (2002), mendefinisikan iklim investasi sebagai semua kebijakan, kelembagaan, dan lingkungan, baik yang sedang berlangsung maupun yang diharapkan terjadi di masa mendatang, yang bisa mempengaruhi tingkat pengembalian dan risiko suatu investasi.

Lingkungan bisnis yang sehat diperlukan tidak hanya untuk menarik investor dari dalam dan luar negeri, tetapi juga agar perusahaan yang sudah ada tetap memilih lokasi di Indonesia. Berbagai survei membuktikan, faktor utama yang mempengaruhi lingkungan bisnis adalah tenaga kerja dan produktivitas, perekonomian daerah, infrastruktur fisik, kondisi sosial politik dan institusi (Mudrajat Kuncoro, 2006).

Alasan utama mengapa investor masih menghindari untuk melakukan bisnis di Indonesia adalah ketidakstabilan ekonomi makro, ketidakpastian kebijakan, korupsi (oleh pemerintah baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat), perizinan usaha, dan regulasi pasar tenaga kerja (sumber : *World Bank, 2004*).

Untuk itu, diperlukan perbaikan iklim investasi dan mengembalikan kepercayaan dunia bisnis. Lemahnya perencanaan dan koordinasi peraturan perundangan, baik tingkat vertikal (antara pemerintah pusat-provinsi-kabupaten/kota) dan pada tingkat horizontal (antara kementerian dan badan lainnya) masih banyak terjadi. Reformasi mendasar berkaitan dengan perbaikan iklim bisnis dan investasi di Indonesia yang sangat diperlukan antara lain reformasi kelembagaan dan reformasi birokrat atau para pjabat.

Reformasi kelembagaan, reformasi ini terutama dalam bidang pelayanan investasi. Baik dalam hal prosedur aplikasi, terlebih dahulu investor harus mendapatkan beberapa persetujuan, perizinan, dan "lampu hijau" dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) atau BKPMMD sebagai tahap awal. Demikian juga tahap perizinan dan implementasi proyek investasi sering tertunda karena untuk melakukan bisnis di Indonesia butuh 168 hari dengan biaya yang dapat mencapai rata-rata 14,5 persen dari rata-rata pendapatan. Koordinasi antar tingkatan pemerintahan, baik vertikal maupun horizontal adalah sesuatu hal yang sangat penting.

Tiga hal utama yang diinginkan investor dan pengusaha antara lain penyederhanaan sistem dan perizinan, penurunan berbagai pungutan yang tumpang tindih, serta transparansi biaya perizinan. Tumpang tindih peraturan pusat dan daerah, yang tidak hanya menghambat arus barang dan jasa tetapi juga menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat. Salah satu bentuk nyata yang perlu dilakukan adalah deregulasi, harmonisasi dan sinkronisasi berbagai peraturan antara pusat dan daerah.

Reformasi peraturan dapat dimulai oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Beberapa masalah pengawasan yang muncul dengan sistem saat ini adalah: (1) tidak semua perda diserahkan kepada pemerintah pusat (2) proses *review* peraturan daerah (perda) dinilai lambat karena dibebankan kepada pemerintah pusat (3) banyak pemerintah daerah mengabaikan aturan mengenai perda bermasalah.

Oleh karena itu, agenda yang perlu dilakukan adalah pemerintah provinsi diberi kepercayaan dan wewenang untuk: (1) mengkaji semua perda dari pemda kabupaten/kota di wilayahnya; (2) bekerja sama dengan pemerintah pusat dan provinsi lain dalam mengembangkan prosedur dan standar pengkajian perda.

Reformasi para birokrat dan pejabat di pusat maupun daerah yang masih berperilaku "harus dilayani" dan belum menjadi fasilitator bagi dunia bisnis. Ini merupakan tantangan perbaikan terhadap kinerja pemerintah.

Guna meningkatkan kegiatan ekspor impor, beberapa institusi yang perlu dibenahi antara lain lembaga yang mengurus jalan raya, pelabuhan, bea cukai, serta kepolisian. Dengan perbaikan kinerja seperti ini diharapkan akan terjadi perubahan iklim investasi.

Oleh karena itu pelajaran berharga yang dapat dipetik adalah menggerakkan dan mengerahkan instrumen ekonomi dalam bentuk regulasi baik fiskal dan moneter untuk menciptakan iklim usaha yang sehat. Satu hal penting adalah mengubah paradigma usaha yang lebih agresif dan kompetitif dengan terus meningkatkan efisiensi. Termasuk terus melanjutkan pembangunan infrastruktur yang mendukung pengembangan dunia usaha. Demikian juga secara bertahap mengurangi biaya produksi (*cost of production*) bagi dunia usaha Indonesia.

3.4.3. Efektivitas Implementasi *Investment Relation Program*

Investor Relation Program adalah salah satu program yang memegang peranan penting dalam menciptakan komunikasi yang lebih baik antara kreditur dan debitur. Sedangkan *investor relations* adalah pengelolaan aliran informasi keuangan, pemasaran dan strategi antara negara/perusahaan dengan investor dalam rangka membangun kepercayaan antara pihak-pihak yang terlibat terutama dalam pasar modal. Efektivitas suatu *investor relations* akan tercermin dari berhasilnya membangun *image* yang positif dari suatu negara/perusahaan serta *validnya* penilaian pasar yang dibuat sehingga dapat menurunkan *cost of capital* di suatu perusahaan/negara.⁵

Oleh karena itu dengan pemikiran tersebut maka kemudian dibentuklah *Investor Relation Unit* (IRU) pada tahun 2006 diharapkan akan meningkatkan *image* yang baik terhadap iklim investasi di Indonesia. IRU didirikan bertujuan untuk membangun strategi komunikasi yang aktif dan proaktif dengan pasar pada umumnya secara rutin dan intensif. Termasuk diharapkan dengan pengusaha/pemerintah China pula. Tujuan lainnya adalah terciptanya komunikasi dua arah antara IRU dengan investor guna mendukung pengambilan kebijakan yang berorientasi pada kesinambungan pembangunan ekonomi jangka panjang yang akan menempatkan posisi Indonesia pada tingkat rating yang baik (*investment grade*).

Dampak *sovereign rating* yang naik, investor akan percaya bahwa berinvestasi di Indonesia mempunyai resiko kecil (*less risky*). Investor akan menanamkan modalnya di Indonesia, membangun pabrik-pabrik di berbagai daerah di Indonesia. Efeknya, tenaga kerja di daerah akan terserap,

⁵ Sumber: Dedikasi Hubungan investor, PKEKU, BKF, 2007

pendapatan perkapitapun akan naik, demikian pula daya beli (*purchasing power*) akan naik. Posisinya lagi, semakin banyak perusahaan-perusahaan, infrastruktur, seperti jembatan atau jalan, pelabuhan semakin baik.

Efektivitas IRU ini juga akan ditentukan oleh koordinasi yang baik seluruh anggota yang terdiri dari departemen terkait, baik Departemen Keuangan, Bank Indonesia, Menko Perekonomian, Departemen Perdagangan, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Departemen Perindustrian, Kementerian BUMN, Biro Pusat Statistik dan Perusahaan Pengelola Aset.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

Pertumbuhan perdagangan China Indonesia mengalami peningkatan pasca ACFTA. Rata-rata *share* total perdagangan Indonesia-Cina terhadap total perdagangan semua negara dengan Indonesia sebelum ACFTA 6,87 persen, meningkat menjadi 9,40 persen pada pasca ACFTA.

Rata-rata ekspor sesudah ACFTA juga mengalami kenaikan dibanding sebelumnya. Pasca ACFTA rata-rata ekspor per tahun hanya mencapai US\$ 3.770, kemudian naik menjadi US\$ 7.940 per tahun pasca ACFTA.

Namun hal ini tidak diikuti perkembangan investasi China ke Indonesia yang masih relatif kecil. Investasi China ke Indonesia dibandingkan dengan total investasi dunia ke Indonesia sesudah perjanjian ACFTA rata-rata hanya sebesar 0,006, sebelumnya juga rata-rata sebesar 0,006.

Beberapa hal yang perlu ditingkatkan untuk menumbuhkan investasi adalah perbaikan infrastruktur, menciptakan iklim usaha yang kondusif, meningkatkan efisiensi produk dan daya saing usaha serta mendorong pengusaha Indonesia untuk lebih kreatif dan agresif. Termasuk mengefektifkan lembaga-lembaga, forum komunikasi maupun *Investor Relation Program* dalam rangka meningkatkan minat berinvestasi di Indonesia.

4.2. Saran

Kebijakan peningkatan pembangunan dan perbaikan infrastruktur sebagai elemen mendasar untuk menarik investasi asing adalah mutlak harus dilakukan. Pemerintah seyogyanya kembali mengambil langkah kebijakan menerapkan pembangunan infrastruktur yang besarnya lebih dari 5 persen dari GDP karena selama ini hanya sekitar 2 persen dari GDP.

Perlu semakin banyak ditingkatkan komunikasi dengan pengusaha-pengusaha China sebagai upaya peningkatan investasi melalui berbagai forum dialog atau komunikasi termasuk menjajagi perdagangan langsung dengan China karena selama ini masih banyak melalui negara ketiga seperti Singapura.

Reformasi birokrasi terus dilakukan guna menciptakan iklim investasi yang kondusif. Beberapa lembaga yang terus dilakukan revitalisasi perbaikan kinerjanya antara lain adalah lembaga yang menangani ekspor impor, pabean, pelabuhan, jalan raya dan kepolisian. Demikian juga lembaga-lembaga yang memberikan perizinan serta memperbaiki kinerja Pemerintah Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Syamsul , Ediana Rae, Dian dan Joseph PR. Charles, *Kerja Sama Perdagangan Internasional, Peluang dan Tantangan bagi Indonesia*, Penerbit PT Elex media Komputindo, Jakarta, 2007
- Baasir, Faisal, *Indonesia Pasca Krisis, Catatan Politik dan Ekonomi 2003-2004*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2004
- Balassa, Bela , *Revealed Comparative Advantage Revisited: An Analysis of Relative Export Shares of the Industrial Countries*, *The Manchester School of Economic & Social Studies*, 1977, vol. 45, issue 4, pp. 327-44
- David S. Rubin, Richard I. Levin, *Statistic for Management*, Seventh Edition, An Imprint of Pearson Education, New Delhi, India, 2006
- Kuncoro, Mudrajat, *Ekonomika Industri Indonesia Menuju Negara Industri baru 2030*, Penerbit Andi Yogyakarta, 2007
- Mankiw, N. Gregory, *Teori Makroekonomi*, edisi kelima, Harvard University, Penerbit Erlangga, 2003
- Rahardja Prathama, Manurung Mandala, *Teori Ekonomi Makro suatu pengantar*, edisi ketiga, LPFEUI, 2005
- Subiyanto, Heru dan Riphath, Singgih, *Kebijakan, Fiskal, Pemikiran Konsep dan Implementasi*, Penerbit Buku Kompas, 2004
- Salvatore, Dominick, *Ekonomi Internasional, Teori dan Soal-Soal*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1992
- Tambunan, Tulus, *Perdagangan Internasional dan Neraca Pembayaran, Teori dan temuan Empiris*, LP3ES, Jakarta, 2000
- Todaro, P, Michael, dan Smith C. Stephen, *Pembangunan Ekonomi Didunia Ketiga*, Edisi Kedelapan, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2006
- www. bappenas.go.id
- <http://202.158.49.150/edisi-cetak/edisi-harian/ekonomi-global/1id86427.html>
- Publik UGM; <http://www.mudrajaad.com>
- <http://one.indoskripsi.com/node/306>
- http://faizrock.co.cc/1_12_PERANAN-INVESTASI-BAGI-PEMBANGUNAN-EKONOMI.html
- <http://www.dephub.go.id/admin/index.php?name=News&file=article&sid=253&theme=Printer>
- http://agribisnis.net/Pustaka/BAHAN_WEB_ACFTA.htm
- <http://www.weforum.org/en/initiatives/gcp/Global%20Competitiveness%20Report/index.htm>